**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA , KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

Dalam menganalisis Pengaruh Upah Minimum, Jumlah Industri Manufaktur Dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Kota Bandung Tahun (1999-2012), penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah.

* + 1. **Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data strategis dari Badan Pusat Statistik terhadp masalah ketenagakerjaan untuk seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population),* tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh batasan umur yang masing-masing berbeda untuk setip negara. Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, dimana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda. Usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang telah di anggap mampu melaksanakan pekerjaan, mencari kerja, bersekolah, mengurus rumah tangga dan kelompok lainnya seperti pensiunan, (Disnaker, 2008). Angkatan kerja dikatakan bekerja apabila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara berkelanjutan selama satu minggu yang lalu. Penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Santosa, 2001). Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah. Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni, keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak memperkerjakan tenaga kerja terampil tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Samuelso dan Nordhaus, 2001).

Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau bisa juga disebut sumber daya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataanya jumlah penduduk yang banyak tidak selalu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan, (Disnaker, 2008).

Penduduk

Bukan Usia Kerja

Usia Kerja

Bukan Angkatan Kerja

Angkatan Kerja

Lainnya

Mengurus RT

Pengangguran

Sekolah

Bekerja

Sudah Punya Pekerjaan Tapi Belum Mulai Bekerja

Mempersiapkan Usaha

Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan pekerjaan

Mencari Pekerjaan

Sementara Tidak Bekerja

Sedang Bekerja

Pekerja Penuh

Pekerja tidak Penuh

Pekerja Paruh Waktu

Setengah Pengangguran

**Gambar 2.1**

**Gambaran Ketenagakerjaan**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar

Dari bagan diatas terlihat bahwa angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk yang termasuk kedalam usia kerja. Usia kerja adalah suatu tingkat umur seseorang yang diharapkan sudah dapat bekerja dan menghasilkan pendapatannya sendiri. Usia kerja ini berkisar antara 15-64 tahun. Selain penduduk dalam usia kerja, ada juga penduduk diluar usia kerja, yaitu dibawah usia kerja dan diatas usia kerja, penduduk yang dimaksud yaitu anak-anak usia sekolah dan yang sudah pensiun atau usia lanjut. Bagian lain penduduk dalam usia kerja adalah bukan angkatan kerja. yang termasuk didalamnya adalah para remaja yang sudah termasuk usia kerja tetapi belum bekerja atau belim mencari pekerjaan karena masih sekolah, ibu rumah tangga pun termasuk kelompok bukan angkatan kerja. (BPS Provinsi Jawa Barat).

Penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja dikelompokan menjadi tenaga kerja (bekerja) dan bukan kerja (mencari kerja atau menganggur). Tenaga kerja (*Man Power*) adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikur serta dalam proses produksi serta mengasilkan barang atau jasa. Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentunya akan membawa pengaruh yang tidak baik untuk perekonomian, yakni penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja atau kesempatan kerja tidak mampu menampung seluruh tenaga erja maka yang akan terjadi ialah akan membuat semakin banyak pengangguran. Dalam penciptaan lapangan kerja tentunya merupakan salah satu masalah di tanah air. Misalnya bukan hanya bagaimana menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan juga kuaitas tenaga kerja. (BPS Provinsi Jawa Barat).

Tenaga kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.( Simanjuntak ,1985**)**.

Istilah tenaga kerja selalu dikaitkan dengan jumlah para pekerja sebenarnya atau potensial yang tercakup dalam suatu penduduk.Tenaga kerja biasanya diukur menurut unit orang yang terdapat di dalamnya, dan bukan dari segi unit pekerjaan. Karena kegiatan pekerjaan senantiasa mengalami perubahan yang kontinu, semua kegiatan tersebut harus dihitung pada suatu saat tertentu, dan sedapat mungkin menurut jangka waktu yang sama atau yang singkat (Barclay dikutip dari Jumriadi, 2010: 10).

Berdasarkan penduduknya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Berdasarkan batas kerja, tenaga kerja (*manpower*) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. (Disnaker Kota Bandung).

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang 8 tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut.Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. (Disnaker Kota Bandung).

**2.1.2 Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam satu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam satu unit usaha (BPS, 2007).

Sudarsono (2007), menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang tersedia di satu daerah. Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Penyerapan tenaga kerja adalah penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja.

Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional (Simanjuntak, 1985). Pada negara yang sedang berkembang umumnya masalah pengangguran merupakan problema yang sulit dipecahkan hingga kini. Karena masalah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi yang maksimal.

Seperti halnya dinegara Indonesia, pemerintah mengupayakan berbagai jalan keluar untuk dapat mengatasi pengangguran secara lambat laun baik diperkotaan dan dipedesaan. Proses dari usaha-usaha kesempatan kerja yang merupakan topik dalam penelitian ini dapat diwujudkan apabila pembinaan dan pembangunan industri-industri kecil, sedang dan besar dapat berjalan semestinya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mendorong perekonmian rakyat.

Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam makanya menghimpun orang atau tenaga kerja disuatu lapangan usaha untuk dapat sesuai dengan usaha itu sendiri.Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing sektor. Kedua, secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya dalam pendapatan nasional (Simanjuntak, 2001). Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dakam hal penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di Kota Bandung pada sektor Industri Manufaktur. Adapun pendapat lain yaitu menurut (Todaro, 2003), penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2003).

**2.1.3 Permintaan Tenaga Kerja**

 Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas ternaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberika kepuasan kepadanya. Sementara pengusaha memperkerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja seperti itu dinamakan *derived demand.* *Derive demand* yaitu meningkatkanya permintaan terhadap barang dan jasa yang akan menimbulkan tambahan tenaga kerja. **(Simanjuntak 2001).**  Simanjuntak (1985) mendefinisikan yang dimaksud dengan permintaan adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah permintaan. Sedangkan jumlah yang diminta berarti banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu.

 Pandangan mainstream ekonomi terhadap permintaan adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (*Derive Demand)* yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimalkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau pelaku untuk memberikan keputusan kepada konsumen, namun maksiminasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja. Dengan pertimbanga tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusahaan beroperasi dalam sisrtem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah saat dengan nilai produk marginal tenaga kera (***Value Marginal Product of Labor,*VMPL)** menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

 Permintaan akan tenaga kerja itu bersifat *derived demand* yang berarti bahwa permintaan tenaga kerja oleh pengusaha sangat tergantung pada permintaan masyarakat terhadap hasil produksinya. Sehingga untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing untuk aset dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu perusahaan harus benar-benar mempunyai tenaga kerja yang memang mampu membawa perusahaan untuk menghadapi persaingan. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut, produsen akan menambah penggunaan tenaga kerja. (**Simanjuntak, 2001).**

L

D = MMP X P

1

W

W

D

Upah

2

W

N

N

N

Penempatan

O

1

2

**Gambar 2.2**

**Kurva Permintaan Terhadap Tenaga Kerja**

Sumber : Payaman J.Simanjuntak 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia

Garis DD melukiskan besarnya nilai hasil pekerja (**VMPPL)** untuk setiap tingkat penempatan. Misalkan pekerja yang dipekerjakan sebesar ON1 = 100 orang, maka nilai hasil kerja orang yang ke-100 dinamakan **VMPPL** –nya dan besarnya sama dengan **MPPL X P = W1.** Nilai ini lebih besar dari tingkat upahyang sedang berlaku (w), oleh sebab itu laba pengusaha akan bertambah dengan menambah tenag kerja baru.

Produsen akan mempertahankan pengguna tenaga kerja sebesar ON dengan tingkat upah setinggi OW, karean pada tingkat ini produsen akan memperoleh laba maksimal, diman **VMPPL** sama dengan upah yang dibayarkan kepada pekerja. Penambahan tenaga kerja lebih besar dari ON misalkan sebesar ON2 akan mengurangi keuntungak produsen. Produsen membayar upah pada tingkat yang berlaku (W), pada hal ini hasil margin yang diperoleh hanya sebesar W2 yang lebih kecil dari W, jadi produsen cenderung untuk menhindari jumlah pekerja lebih dari ON. Penampahan pekerja yang lebih besar dari ON dapat dilakukan hanya bila produsen yang bersangkutan dapat membayar upah pekerja dibawah W

**2.1.4 Upah Minimum**

Pasar tenaga kerja, sama halnya dengan pasar-pasar dalam perekonomian yang diatur oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat upah (Mankiw, 2003:4). Menurut Ricardo (Deliarnov, 2009:53) nilai tukar suatu barang ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya bahan dan upah alami (*natural wage)*. Besarnya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Sama halnya dengan harga-harga lainnya, harga tenaga kerja (upah) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah yang sama besarnya dengan niali kontribusi mereka dalam barang dan jasa (Mankiw,2003:11).

Menurut Todaro (2000:327), tingkat upah dalam bentuk uang dalam kenyataan tidak pernah fleksibel dan venderung terus-menerus turun karena karena lebih sering dan lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kekuatan institusional seperti tekanan serikat dagang atau serikat buruh. Kemerosotan ekonomi selama decade 1980-an yang melanda Negara-negara Afrika-Amerika Latin mengakibatkan merosotnya upah dan gaji rill di segenap instansi pemerintah, namun ternyata masih banyak caon pekerja yang memburu posisi kerja di sektor formal meskipun mereka tahu gajinya semakin lama semakin tidak memadai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Tingkat pengagguran sangat parah dan bertambah buruk

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu gaji dan upah. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja tetap dan tenaga kerja professional sperti pegawai pemeritah, dosen, guru, manajer dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, buruh kasar dan lain sebagainya. Teori ekonomi mengartikan upah sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, dengan demikian daam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dan pembayaran kepada pegawai tidak tetap. ( Sukirno, 2008:350-351).

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000).

 Menurut Gilarso (2003), upah merupakan balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Masih menurut Gilarso, upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal (sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu). Upah dalam arti sempit khusus dipakai untuk tenaga kerja yang bekerja pada orang lain dalam hubungan kerja (sebagai karyawan atau buruh). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMP), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang 19 dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha, dan perbedaan jenis pekerjaan.

Di dalam pasar tenaga kerja dikenal konsep upah umum. Samuelson & Nordhaus (1996), mengemukakan bahwa dalam kenyataannya, hanya sedikit pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna.Selanjutnya mereka juga mengemukakan bahwa dalam menganalisis pendapatan tenaga kerja, kita perlu mengetahui upah riil yang menggambarkan daya beli dari jam kerja, atau upah nominal dibagi oleh biaya hidup. Upah umum ini yang kemudian diadopsi menjadi upah minimum yang biasanya ditentukan oleh pemegang kebijakan pemerintah. Gie (1999), menyatakan bahwa standar upah buruh harus ada batasan minimumnya. Negara berkembang tidak boleh seenaknya menentukan upah buruh serendah mungkin. Selanjutnya Sastrohadiwiryo (2003), menyatakan bahwa perwujudan penghasilan yang layak dilakukan pemerintah melalui penetapan upah minimum atas dasar kebutuhan hidup layak.

 Kebijakan mengenai upah minimum menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ekonom. Kebanyakan para ekonom menyatakan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum sering menyebabkan terjadinya pengangguran sebagian pekerja. Namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan itu setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lainnya. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Suryahadi (2003), bahwa keefisien dari upah minimum untuk semua pekerja dari angkatan kerja adalah negatif, kecuali pekerja kerah putih (white collar). Hal ini sesuai dengan kerangka teoritis bahwa upah minimum akan mereduksi kesempatan kerja dari pekerja dengan skill yang rendah di sektor formal.

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/jasa daripara produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung pada :

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya

2. Peraturan Undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja

3. Produktivitas marginal tenaga kerja

4. Tekanan yang dapat dberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha

5. Perbedaan jenis pekerjaan

Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap harga dari tenaga yang dikorbankan pekerja untuk kepentingan produksi, sehubung dengan hal itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu :

1. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh para pekerja.

2. Upah Rill adalah kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang atau jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bias didapatkan dari pertukaran tersebut. (Sukirno, 2008:35)

Kebijakan upah di Indonesia merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja menetap bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar kebutuhan hidup layak (KHL). Pasal 1 Ayat 1 dari Peraturan Mentri Tenaga Kerja No. 1 Tahun 1999, mendefinisikan upah minimum sebagai “ *upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap”.* Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, termasuk tunajangan, baik untuk pekerja itu sendiri maupun keluarganya. Upah minimum adalah upah pokok tunjangan yang ditetapkan secara regional, sektorl maupun subsektoral. Peraturan Menteri tersebut lebih jauh juga menetapkan upah minimum sektoral pada tingkat provinsi harus lebih tinggi sedikitnya lima persen dari standar upah minimum yang ditetapkan untuk tingkat provinsi. Demikian juga, upah minimum sektoral di tingkat kabupaten /kota harus lebih tinggi lima persen dari standar upah minimum kabupaten/kota tersebut.

 Menurut Devanto dan putu (2011) menerangkan bahwa upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawannya untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjajian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 yang dimana upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum yang dimiliki oleh stiap daerah.

 Upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja. Upah ditentukan dengan melibatkan evaluasi dari kontribusi karyawan sebagai bentuk penghargaan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan diri organisasi dan peraturan hukum yang berlaku (Sukirno 2002:353, Fopuhunda, et, al,2011).

Menurut Prasetyo (2010) bahwa penetapan upah minimum pada suatu daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, sedangkan menurut Yaniv (2006) mengatakan bahwa apabila perusahaan-perusahaan tidak patuh terhadap peraturan penetapan upah minimum, maka akan mempengaruhi upah dipasar bebas dan upah minimum tidak akan berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja.

* + 1. **Teori Produksi**

 Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi modal, tenaga kerja, teknologi dan

*managerial skill.* Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input dan output (Soeharno, 2007).

Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah output maksimum yang bisa diproduksi dan input yang diperlukan guna menghasilkan output tersebut, dengan tingkat pengetahuan teknik tertentu (Paul A. Samuelson, 1992).

Fungsi produksi menunjukan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal juga dengan istilah input dan jumlah produksi selalu disebut dengan output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu seperti yang berikut:

Q = f ( K, L, R, T )..............................................................................(2.1)

 Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja dan keahlian keusahawanan, R adalah kekayaan alam dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor produksi tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya.

Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut dalam jumlah yang berbeda-beda juga. Di samping itu, untuk tingkat produksi tertentu, dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda (Sadono Sukirno, 2006).

Menurut Boediono (1992), setiap proses produksi mempunyai landasan teknis, yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukan hubungan antara tingkat output dan tingkat (dan kombinasi) penggunaan input-input. Setiap produsen dalam teori dianggap mempunyai suatu fungsi produksi.

Menurut Beatie dan Taylor (1994), produksi adalah proses kombinasi dan koordinasi material-material serta kekuatan (faktor produksi, sumber daya) dalam menghasilkan suatau barang/jasa (output).

**2.1.5.1 Fungsi Produksi Jangka Pendek dan Jangka Panjang**

Dalam menganalisis bagaimana perusahaan melakukan kegiatan produksi, teori ekonomi membedakan jangka waktu analisis kepada dua jangka waktu yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Analisis keatas kegiatan memproduksi perusahaan dikatakan di dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Di dalam masa tersebut perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap tersebut. Faktor produksi yang dianggap tetap biasanya adalah faktor modal seperti mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat memproduksi lainnya dan bangunan perusahaan, sedangkan faktor produksi yang dimisalkan dapat mengalami perubahan adalah tenaga kerja (Sukirno, 2006).

Waktu yang dipandang sebagai jangka pendek berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Bandingkan perusahaan roti dengan perusahaan pengangkutan udara. Katakanlah masing-masing perusahaan tersebut mengalami pertambahan permintaan dan untuk memenuhinya harus menambah kapasitasnya. Dalam beberapa bulan saja perusahaan roti telah memperoleh mesin baru dan selanjutnya menambah produksi sesuai dengan permintaan yang bertambah. Perusahaan penerbangan akan memerlukan waktu yang lama untuk menambah kapasitasnya, diperlukan beberapa tahun untuk mendapatkan tambahan kapal terbang yang baru.

Dalam jangka panjang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Ini berarti bahwa dalam jangka panjang bahwa setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang hal tersebut diperlukan. Di dalam jangka panjang perusahaan dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang berlaku di pasar. Jumlah alat-alat produksi dapat ditambah, penggunaan mesin-mesin dapat dirombak dan dipertinggi efisiensinya, jenis-jenis barang baru dapat diproduksi dan teknologi produksi ditingkatkan (Sukirno, 2006).

**2.1.5.2 Fungsi Produksi Cobb-Dougglas**

Fungsi produksi Cobb-Douglas ini sering disebut sebagai fungsi produksi eksponensial. Fungsi produksi ini berbeda satu dengan yang lain, tergantung pada ciri data yang ada dan digunakan, tetapi umumnya ditulis dengan :

Y= aXL.............................................................................................(2.2)

Fungsi produksi eksponensial atau Cobb-Douglas ini sudah banyak digunakan dalam studi-studi tentang fungsi produksi secara empiris, terutama sejajk Charle W.Cobb dan Paul H. Douglas memulai menggunakannya pada tahun 1920. Fungsi atau persamaan ini melibatkan dua variabel atau lebih, yang mana variabel yang satu disebut sebagai variabel dependen atau yang dijelaskan dan yang lain disebut sebagai variabel independen atau yang menjelaskan.

 Penggunaan bentuk fungsi ini sudah sangat populer dalam penelitian empiris. Keuntungan menggunakan fungsi ini adalah hasil pendugaan garis melalui fungsi ini akan menghasilkan koefisien regresi yang sekaligus juga menunjukkan tingkat RTS. Namun demikian, penggunaan fungsi produksi cobb-douglas masih harus memerlukan berbagai asumsi :

1. Sampel yang digunakan secara acak
2. Terjadi persaingan sempurna diantara masing-masing sampel, sehingga masing-masing dari mereka bertindak sebagai *price taker*, yang mana baik Y maupun X diperoleh secara bersaing pada harga yang bervariasi.
3. Teknologi diasumsikan netral, artinya bahwa *intercept* boleh berbeda, tetapi *slope* garis penduga cobb-douglas dianggap sama karena menyebabkan kenaikan output yang diperoleh dengan tidak merubah faktor-faktor produksi yang digunakan.
4. Fungsi cobb-douglas lebih mudah diselesaikan dengan fungsi logaritma, maka tidak boleh terjadi adanya pengamatan atau perolehan data yang bernilai nol.
5. Karena merupakan fungsi linier dalam logaritma, maka pendugaan parameter yang dilakukan harus menggunakan penaksiran *Ordinary Least Square (OLS)* yang memenuhi persyaratan BLUE (*Beast Linier Unbiassed Estimator)*.

Secara matematis, fungsi produksi cobb-douglas dapat ditulis sebagai berikut :

Y = α Tβ1TK β2 K β3....................................................................................(2.3)

Dimana :

Y = output

T = Teknologi

TK = Tenaga Kerja

K = Kapital (modal)

β1, β2, β3 = parameter yang ditaksir nilainya

*Return to Scale* didefinisikan sebagai derajat perubahan output apabila semua input diubah dalam proposi yang sama. Skala hasil perlu dihitung untuk mengetahui apakah kegiatan dari suatu usaha mengikuti kaidah increasing, descreasing, atau constan return to scale. Jika fungsi produksi :

YO  = α Tβ1TKβ2Kβ3 ..................................................................................(2.4)

Y = α . (kTβ1) . (kTKβ2) . (kKβ3)................................................................(2.5)

 = α . Tβ1 . TKβ2 . Kβ3 . k β1β2β3................................................................(2.6)

 = YO. kβ1β2β3............................................................................................(2.7)

Kemudahan dalam estimasi atau pendugaan terhadap persamaan diatas dapat dilakukan dengan mengubah bentuk linier berganda dengan cara menjadikan linier berganda dengan cara menjadikan bentuk logaritma, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut :

Log Y = logα + β1 log T + β2 log TK + β3 log K ....................................(2.8)

Dimana :

α = tingkat efisiensi proses produksi keseluruhan

β1T = elastisitas produksi untuk masing-masing faktor produksi

β2TK = tingkat skala hasil

β3K = mengukur intensitas penggunaan faktor produksi

Dengan demikian persamaan Cobb-Douglas telah didapat dengan ea merupakan indeks efisiensi dari proses transformasi, serta a dan b merupakan elastisitas produksi dari input yang digunakan Soekartawi (1993) menyatakan *Return to scale (RTS)* digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan dari usaha tani tersebut mengalami kaidah *increasing,* constan atau *decreasing return to scale* serta dapat menunjukkan efisiensi produksi secara tehnis. Ada tiga alternatif yang bisa terjadi dalam RTS, yaitu :

1. *Decreasing return to scale*, apabila (β1 + β2 + β3) < 1, artinya proposi perubahan output lebih kecil dari proposi perubahan input

2. *Constant return to scale*, apabila (β1 + β2 + β3) = 1, artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi akan sama dengan proporsi penambahan produksi

3. *Increasing return to scale*, apabila (β1 + β2 + β3) > 1, artinya bahwa proporsi penambahan produksi melebihi proporsi penambahan faktor produksi

Berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, terdapat tiga situasi yang mungkin dalam tingkat pengembalian terhadap skala (Browning dan Browning, 1989).

1. Jika kenaikan yang proporsional dalam semua input sama dengan kenaikan yang proporsional dalam output (εp = 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala konstan (constant returns to scale).

2. Jika kenaikan yang proporsional dalam output kemungkinan lebih besar daripada kenaikan dalam input (εp > 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala meningkat (increasing returns to scale).

3. Jika kenaikan output lebih kecil dari proporsi kenaikan input (εp < 1), maka tingkat pengembalian terhadap skala menurun (decreasing returns to scale).

**2.1.6 Belanja Daerah**

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir & tentang Keuangan Negara). Semua penerimaan daeah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran terterntu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengelaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran daerah memiliki beberapa fungsi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu :

1. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahunyang bersangkutan.

1. Fungsi Perencanaan

Anggara Daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

1. Fungsi Pengawasan

Anggaran Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Fungsi Alokasi

Anggaran Daerah diarahkan untuk mengurangi pengagguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

1. Funsi Distribusi

Anggaran Daerah harus mengandung arti rasa keadilan dan kepatutan.

1. Fungsi Stabilisasi

Anggaran Daerah harus mengandung arti menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

 Struktur APBD merupakan saru kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

 Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melebihi Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dan lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dan perimbangan dan lain-lain pendapatan

1. Belanja Daerah

 Komponen berikutnya dari APBD adalan Belanja Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

1. Pembiayaan

Pembiayan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akn diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran belanja berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

 Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pada pasal 1 ayat 13 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 menyebutkan bahwa belanja daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

 Menurut Halim (2003), belanja daerah adalah pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Sri Lesminingsih ( Abdul Halim, 2001:199) bahwa pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah selama periode tahun anggaran yang bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Sedangkan menurut Abdul Halim (2002) yang mengemukakan bahwa belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana.

 Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13/2006 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yag terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangandan belanja tidak terduga. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu belanja atau pengeluaran rutin dan pengeluaran pembanguan. Belanja rutin pada dasranya berunsurkan pos-pos belanja untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintah sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanaj barang seperti berbagai macam subsidi, angsuran dan lain-lain. Sedangkan belanja atau pengeluaran pembangunan merupkan penegluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik.

 Sistem penganggaran Kep-mendagri nomor 29 tahun 2002 pada pasal 6 mengklasifikasi utama yaitu pertama, belanja daerah yang terdiri dar bagian belanja aparatur daerah dan bagian belanja pelayanan publik. Kedua, masing-masing belanja dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Tersangka.

Sedangkan menurut Mardin Manurung (Halim, 2001) yang mengemukakan bahwa belanja daerah dibagi menjadi Belanja Rutin, Belanja Investasi yang terdiri dari Belanja Peayanan Publik dan Belanja Aparatur/pegawai, Pengeluaran Transfer, serta Pengeluaran Tidak Terduga.

**2.1.7 Industri dan Industrilisasi**

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Dumairy,1996). Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Toto Hadikusumo (1990) pengertian industri adalah: “Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (*assembling*).

 Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai leading sector maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika, 2000). Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefenisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja (Chenery,1986). Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruk sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sector. Berdasarkan pengalaman dihampir semua negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

**Tabel 2.1**

 **Klasifikasi Industri Menurut Banyaknya Tenaga Kerja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Klasifikasi Industri**  | **Jumlah Tenaga Kerja (Orang)** |
| **1.** | Industri Besar | 100 keatas |
| **2.** | Industri Sedang | 20-90 |
| **3.** | Industri Kecil | 5-19 |
| **4.** | Indutri Rumah Tangga | 1-4 |

 Sumber : BPS Kota Bandung

**A. Industri Besar Sedang**

Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi Sembilan sub sektor. Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi empat sub golongan, yaitu: industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengolompokan ini, industri besar sedang menghasilkan nilai tambah terbesar

**B. Industri Kecil dan Rumah Tangga**

 Dalam rangka menunjang pembangunan disektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan, khusunya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor. Dalam pembentukan PDRB, peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar.

 **C. Industri Kecil Dan Menengah**

 Sementara itu UKM (Usaha Kecil Menengah) meliputi usaha kecil informal/ tradisional dan juga usaha menengah, yang mengelola usahanya sudah lebih maju jika dibandingkan dengan industri kecil informal dan tradisional. Disamping itu juga dari segi permodalan juga sudah lebih besar dan manejemen juga lebih maju. Upaya pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan, yaitu denga menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga sektor industri terutama sektor industri UKM dapat terus tumbuh dan berkembang, seiring dengan majunya industri besar. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan industri berdasarkan tujuan perekonomian serta kebijaksanaan ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan nasional, perluasan kesempatan kerja, pembagian pendapatan secara merata, perkembangan industri regional, serta pengurangan jumlah pengangguran.

**2.1.7.1 Teori Industrialisasi**

Proses industrialisasi dan pembangunan industri ini sebenarnya merupakan suatu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dua pengertian sekaligus. Pertama yaitu tingkat hidup yang lebih maju. Kedua, menjadikan taraf hidup yang lebih berkualitas, atau dengan kata lain pembangunan industri itu sendiri merupakan kegiatan mandiri yang hanya sekedar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik belaka (Arsyad. 2010:442).

 Keberhasilan sebuah proses industrialisasi tidak terlepas dari adanya dukungan kapasitas sumber daya manusia yang relevan dan kemampuan “proses” tersebut dalam memanfaatkan secara optimal setiap sumber daya alam dan sumber daya lain yang tersedia. Hal ini berarti pula bahwa industrialisasi merupakan sebuah upaya guna meningkatkan produktivitas tenaga manusia dengan disertai upaya untuk memperluas ruang lingkup kegiatan manusia. Dengan demikian proses industrialisasi dapat diupayakan dengan dua jalan sekaligus yaitu. Secara Vertikal: yang diindikasikan oleh semakin besarnya nilai tambah pada kegiatan ekonomi. Secara Horizontal: yang diindikasikan dengan semakin luasnya lapangan kerja yang produktif yang tersedia bagi penduduk. (Arsyad 2010:442).

 Disisi lain sektor industri mempunyai peranan salah satunya sebagai sektor pemimpin (leading sector) yang membawa perekonomian menuju kemakmuran. Sektor industri dijadikan leading sktor sebab hal tersebut mempunyai banyak kelebihan dibandingkan sektor pertanian dan jasa. Kelebihannya antara lain, produksinya mempunyai dasar nilai tukar (tern of trade) yang tinggi, nilai tambah besar, bagi pengusaha keuntungan yang besar, dan proses produksinya lebih dikendalikan oleh manusia (Arsyad 2010:442).

 **2.1.8 Industri Manufaktur**

Menurut Arsyad (1992), mengungkapkan sektor industri disebut sebagai *leading sector*  atau sektor pemimpin. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor yang lainnya seperti pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Secara mikro indutri adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang sangat erat. Namun bagi segi pembentukan pendapatan yang cenderung bersifat makro, industri adalah secar luas adalah suatu unit usaha yang menciptakan nilai tambah yakni semua produk baik barang maupun jasa.

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian industri secara luas adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu serta mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produk dan struktur bisaya serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko usaha tersebut (Hasibuan, 1993).

 Sektor industri saat ini masih tetap bertahan sebagai penipang perekonomian Indonesia, meningkatnya kebutuhan rumah tangga akan produk-produk industri membuat pertumbuhan sektor industri di Indonesia semakin pesat. Sektor industri memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, seperti halnya dalam pertumbuhan pendapatan nasional dan penyerapan tenaga kerja.

 Penggolangan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan oleh beberapa lembaga, dengan kriteria yang berbeda. Biro Pusat Statistik (2000)membedakan skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu :

1. Industri besar : berpekerja 100 orang atau lebih
2. Industri sedang : berpekerja antara 20 sampai 99 orang
3. Industri kecil : berpekerja antara 5 sampai 19 orang, dan
4. Industri/kerajinan rumah tangga : berpekerja < 5 oran

 Pengertian lain industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi atau setengah jadi, mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melalukan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling)* (BPS, 2005).

 Perubahan struktur ekonomi terjadi dengan semakin besarnya peranan sektor industri dan sektor jasa. Dalam industri manufaktur terjadi pula perubahan struktur masing-masing jenis industri. Dilihat dari peranan masing-masing industri, perubahan itu di ukur dengan peranan nilai tambah dan jumlah tenaga kerja yang tergangtung pada tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat kemajuan industri dalam perekonomian dilihat dari besarnya kontribusi sumbangan sektor industri dalam produksi nasional (Hasnudi, 1992).

 Industri manufaktur adalah suatu kesatuan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang mentah sehingga menjadi barang jadi dengan menggunakan mesin teknologi atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang tinggi nilainya dan sifat lebih dekat kepada pemakai akhir (BPS : 2003).

 Ketika suatu negara telah mencapai tahap dimana sektor indutri sebagai leading sector maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi (Yustika,2000). Dapat dikatakan industrialisasi sebagai proses transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor indutri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja (Chenery, 1986).

**2.1.8.1 Jenis - Jenis Industri Manufaktur**

**A. Jenis industri berdasarkan Klasifikasi atau berdasarkan SK Mentri Perindustrian No.19/M/I/1986**

Berdasarkan *Internasional Standart of Industrial Clasification (ISIC),* berdasarkan pendekatan kelompok komoditas industry pengolahan terbagi atas beberapa kelompok komoditas.

**Tabel 2.2**

**Kelompok Komoditas Industri Pengolahan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Kelompok Industri** |
| 31 | Industri makanan, minuman, tembakau |
| 32 | Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit |
| 33 | Industri kayu, dan barang-barang dari kayu termasuk perabotan rumah tangga |
| 34 | Industri kertas dan barang-barang dari kertas, pecetakan dan penerbitan |
| 35 | Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet, dan plastik |
| 36 | Industri galian bukan logam kecuali minyak bumi dan batu bara |
| 37 | Industri logam dasar |
| 38 | Industri barang dari logam, mesin dan peralatan |
| 39 | Industri pengilahan lainnya |

 Sumber: Kementrian Perindustrian dan Perdagangan

 **B. Jenis Industri berdasarkan pengelompokan Tenaga Kerja**

Menurut (**Arsyad. 2010:454**) pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibedakan menjadi empat kriteria, yaitu:

1. Industri Besar : industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.
2. Industri Menengah : industri yang menggunakan tenaga kerja antara 20-99 orang.
3. Industri Kecil : industri yang menggunakan tenaga kerja antara 5-19 orang.
4. Industri Mikro / Rumah Tangga : industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 5 orang (termasuk tenaga kerja yang tidak dibayar).

 **C. Jenis Industri berdasarkan besar kecilnya modal**

1. Industri padat modal *(Capital Intensive),* adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan perasional maupun pembangunanya.
2. Industri padat karya *(Labor Intensive)* industri yang lebih dititikberatkan pada sejumlah besar tenaga kerjadalam pembangunan dan pengoprasiannya. (Perpustakaan Online Indonesia)

 **D. Jenis industri berdasarkan pemilihan lokasi**

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (*market oriented industry*), industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati ksntong-kantong dimana konsumen potensial berada. Semakin dekat kepasar akan semakinmenjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja/labor (*man power oriented industry*), industri yang berada pada lokasi dipusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja/pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi untuk menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented Industry*), industri yang mendekati lokasi dimana bahan baku berada untuk memangkas ayau memotong biaya transportasi yang besar.

 **E. Jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan**

1. Industri Primer, yaitu industri yang mana barang barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu.
2. Industri Sekunder, yaitu industri yang bahan mentahnya diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.
3. Industri Tersier, yaitu industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan.

**2.1.8.2 Jumlah Unit Usaha**

Badan Pusat Statistika (BPS) mendefinisikan jumlah unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi, bangunan fisik dan wilayah operasinya.

 Secara umum, pertumbuhan unit usaha dala industri manufaktur pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Menurut (Squere, 1992), jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya, jika unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk penambahan tenaga kerja.

Menurut Matz (2003) dan Wicaksono (2010), dengan adanya peningkatan investasi pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan oleh dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatan jumlah perusahaan pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengagguran atau dengan kata lain meningkatkan penyerapan tenga kerja. Sedangkan menurut Karib (2012 : 61) jumlah unit usaha erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dilihat dari terus meningkatnya jumlah usaha.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkaya pemahaman dalam penelitian penulis juga merivew penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel didalam penelitian yang jugapeneliti bahas dengan judul Pengaruh Upah Minimum, jumlah industri dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Kota Bandung.

* Penelitian yang dilakukan oleh Siestri Pristina Kairupan dengan judul “Produk Domestik Bruto (PDRB), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012” Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif sebesar -1.690236 terhadap kesempatan kerja, tingkat inflasi juga berpengaruh negatif – 0.001708 terhadap kesempatan kerja dan belanja daerah berpengaruh positif sebesar 0.838126.
* Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha dengan judu “ Pengaruh Infalsi, PDRB Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali” Dan hasil penelitian ini adalah upah minimum secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dengan nilai koefisien -0,3681 yang menunjukkan bahwa upah minimum mempunyai pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, apabila upah minimum turun maka akan berpotensi menambah penyerapan tenaga kerja.tidak hanya itu pengaruh tingkat inflasi terhadap peyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan sebesar 0,56 sedangakan PDRB berpengaruh positif dan signifikan.
* Penelitian yang dilakukan oleh Andre Widyyantoro dengan judul “ Pengaruh PDB, Investasi Dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia Tahun 2000-2011. Dan hasil penelitian ini adalah investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 18,024, dan jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai koefisiens 8,940 yang menyimpulkan jika unit usaha naik sebesar 1 unit maka kan meningkatkan 8, 940 atau dibulatkan 9 orang.

.

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan bagian dari landasan teori yang digunakan dalam menganalisis substansi masalah yang diteliti.Pendekatan yang dibutuhkan untuk melihat hasil pengolahan data empiris dengan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian dalam kajian pustaka, maka penulis memilih variabel bebas yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri manufaktur yaitu Upah minimum, Jumlah industri manufaktur dan Belanja daerah.

Sebagai subsektor yang potensial, industri kecil diharapkan memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja, tingkat permintaan yang tinggi terhadap tenaga kerja mempunyai arti penting bagi pembangunan karena dapat membantu mengurangi masalah pengangguran, pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan ekonomi. Menurut Sumarsono (2003:105) Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi, dimana faktor yang mempengaruhi penyerapan akan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tersebut dilihat dari banyaknya penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang telah di anggap mampu melaksanakan pekerjaan, mencari kerja, bersekolah, mengurus rumah tangga dan kelompok lainnya seperti pensiunan (Disnaker, 2008). Berbicara tentang tenaga kerja erat hubungannya dengan upah, karena semakin tingginya upah minimum yang diberikan oleh suatu daerah maka akan tinggi juga para pencari kerja di daerah Kota Bandung, dengan di tunjang oleh belanja daerah yang tinggi dari pemerintah maka hal tersebut akan membantu mendatangkan investor dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari besarnya PDRB yang di dapat. Dengan demikian daerah tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, hal ini mengacu pada kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari sedikitnya jumlah pengangguran dan keadaan perekonomian yang menjadi lebih baik.

* 1. **Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Undang-Undang Republik Indosnesia nomor 13 tahun 2001 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjajian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya. Sukirno (2002:253) mendefinisikan upah adalah pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh pengusaha kepada tenaga kerja. Upah ditentukan dengan melibatkan evaluasi dan kontribusi karyawan sebagai bentuk penghargaan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kemampuan dari organisasi dan peraturan hukum yang berlaku (Fopuhunda, 2011).

 Penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan atau instansi tertentu. Menurut Sumarsono (2003:106) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tibggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Ginding dan Terrel (2006) menjelaskan bahwa upah minimum perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja, domana setiap 10 persen kenaikan upah minimum akan terjadi penurunan jumlah pekerja masing-masing sektor sebesar 1.09 persen. Menurut Kuncoro (2002), kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain.

 Menurut Magruder (2013) dan Kholifah Anggrainy (2013) mengatakan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif terhadap perminyaan tenaga kerja, dengan kata lain temuan tersebut menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja juga berkurang.

* 1. **Pengaruh Jumlah Perusahaan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

 Menurut Matz (2003) dan Wicaksono (2010), dengan adanya peningkatan investasi pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan oleh dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatan jumlah perusahaan pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengagguran atau dengan kata lain meningkatkan penyerapan tenga kerja. Menurut Karib (2012 : 61) jumlah unit usaha erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dilihat dari terus meningkatnya jumlah usaha.

 Tidak hanya itu menurut Aditya (2004) unit usaha adalah satu kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu, dan unit usaha ini berpengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu pertumbuhan unit usaha suatu sektor industri secara signifikan akan menambah jumlah penyerapan tenaga kerja disuatu daerah tertentu.

* 1. **Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Menurut Danang Pratomo (2011) pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang berwujud pada dana-dana pembiayaan. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, dengan kata lain untuk meningkatkan kemakmuran secara merata dan serasi antar daerah dan antar golongan, dilaksanakan melalui upaya bidang ekonomi. Prioritas diberikan kepada sektor-sektor yang dapat merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Hal ini dapat memperluas lapangan pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja.

Menurut Ferdinan (2011) pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif karena pengeluaran pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi, selain itu juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaa aggregat. Adanya kenaikan permintaan mendorong produsen untuk menaikkan output produksinya, untuk itu produsen harus meningkatkan input salah satunya yaitu tenaga kerja sehingga akan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Upah Minimum

Penyerapan tenaga kerja

Belanja Daerah

Jumlah Perusahaan

**Hipotesis**

**Gambar 2.3**

**Kerangka Pemikiran**

Dari kerangka teori diatas menyatakan bahwa upah minimum, jumlah perusahaan dan belanja daerah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

**2.4 Hipotesis**

Untuk melihat hubungan-hubungan variabel yang berkaitan dengan hipotesis, maka :

1. Diduga ada pengaruh negatif antara upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja
2. Diduga ada pengaruh positif antara jumlah perusahaan terhadap penyerapan tenaga kerja
3. Diduga ada pengaruh positif antara belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja.
4. Diduga adanya pengaruh upah minimum, jumlah perusahaan dan belanja daerah terhadap penyerapan yenaga kerja.